



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MOHAMMAD AFLAH FAROBI**
2. Jabatan : **DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS**
3. NHK : **123036**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 3.008.472.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 754.929.000
2. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 379.828.000
3. Tanah Seluas 551 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 198.162.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/81 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 463.053.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 57 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 785.000.000
6. Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 96.425.000
7. Tanah Seluas 697 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 331.075.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 752.390.000**

1. MOBIL, TOYOTA PRADO JEEP Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXY20AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 512.390.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 1.285.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	684.251.281
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.730.113.281
III. HUTANG	Rp.	199.067.119
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.531.046.162

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.